

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA (LKj)

DINAS TENAGA KERJA

TRIWULAN I TAHUN 2026



DINAS TENAGA KERJA

JL. Veteran No. 53 Telp. (0334) 881546 Lumajang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang ini, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

LKj adalah laporan kinerja triwulan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan dalam jangka waktu triwulan selama tahun berkenaan.

LKj ini dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKj ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Lumajang, 2 April 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja

S. BECHAN, SE, MM
Pembina / IV/a

NIP. 19710808 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
2. Isu Strategis	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Target Tujuan OPD	7
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Pengukuran Kinerja	12
3.2 Analisa Capaian Kinerja	23
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah PNS dan PPPK Paruh Waktu Dinas Tenaga Kerja	3
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran	5
Tabel 2.1	Tujuan	8
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang	10
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang	11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	13
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi Triwulan I Tahun 2026	14
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja antara Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dibanding dengan Tahun Sebelumnya	16
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Periode Akhir Renstra	18
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi	18
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD	20
Tabel 3.7	Data Kinerja Tujuan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 3.8	Data Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026	22
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Anggaran s/d Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 4	Analisis Program Penunjang Keberhasilan	27
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

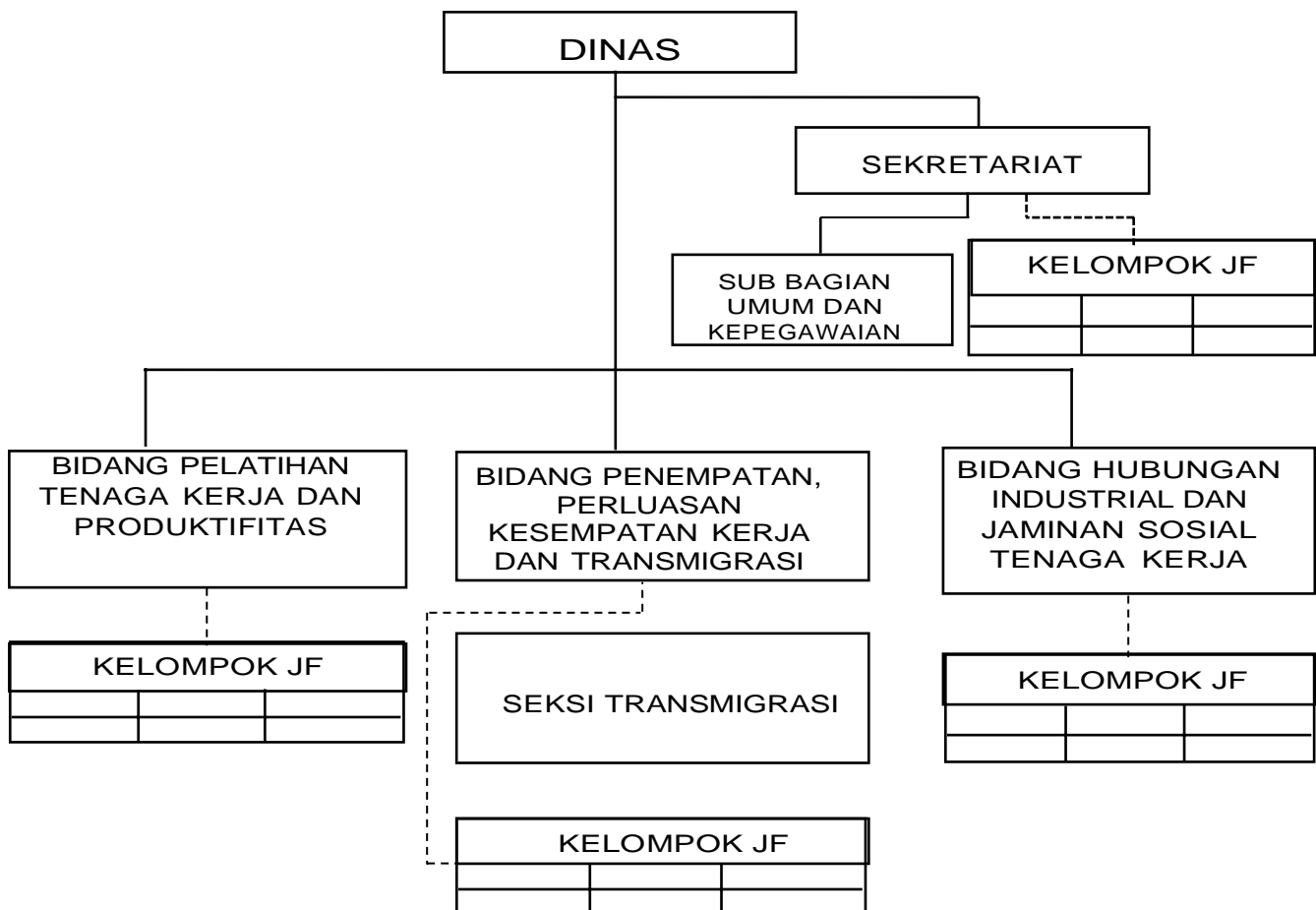
Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terdiri dari Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh jajaran eselon III, eselon IV dan jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Transmigrasi
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 33 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 21 orang, PPPK 4 orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 8 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Per Bulan Maret tahun 2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan PPPK Paruh Waktu Dinas Tenaga Kerja
Per bulan Maret Tahun 2026

No.	Uraian	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	PPPK	PPPK Paruh Waktu		
1	Pendidikan					
	Strata 2 (S 2)	5		0	5	15
	Strata 1 (S 1)	8	4	7	19	58
	Diploma 3	2		0	2	6
	SLTA/SMK	5		1	6	18
	SLTP	0		0	0	0
	SD	1		0	1	3
	J U M L A H	21	4	8	33	100
2	Jenis Kelamin					
	Laki-laki	10	2	4	16	48
	Perempuan	11	2	4	17	52
	J U M L A H	21	4	8	33	100
3	Golongan					
	Golongan IV	6		-	6	24
	Golongan III	11		-	11	44
	Golongan II	4		-	4	16
	Golongan I			-		0
	Golongan IX		4		4	16
	J U M L A H	21	4	0	25	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang terbanyak pada jenjang pendidikan adalah S1 sebanyak 8 orang dan berdasarkan jenjang golongan ruang III sebanyak 11 orang, hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan penyetaraan jabatan (dari jabatan struktural ke jabatan fungsional) sehingga untuk kenaikan jenjang kepangkatan harus memenuhi batas angka kredit yang ditetapkan dan telah mengikuti uji kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.

2. Isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian atau ketrampilan masih relatif kecil.
2. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.

3. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
4. Kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh dalam memahami peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan.
5. Terbatasnya sumber daya manusia ketenagakerjaan (mediator, pengantar kerja dll).
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kompetensi tenaga kerja.
7. Adanya pengangguran akibat terjadinya bencana.
8. Manajemen ketenagakerjaan daerah belum optimal.
9. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi dibidang ketenagakerjaan.
10. Terjadinya dinamika regulasi dibidang ketenagakerjaan.
11. Kurangnya sinergitas multi stakeholders.
12. Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dibidang ketenagakerjaan.
13. Minimnya regulasi daerah terkait ketenagakerjaan.
14. Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia.
15. Masih rendahnya pemberian kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas.
16. Belum optimalnya Sistem Pengelolaan database Tenaga Kerja Daerah.
17. Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigrasi.
18. Pemberangkatan serta penempatan calon transmigran menyesuaikan dengan jadwal pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi.

Dari permasalahan diatas ditetapkan isu-isu strategis seperti yang tercantum dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 dan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.
2. Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak.
3. Masih rendahnya perlindungan tenaga kerja.
4. Masih rendahnya informasi pasar kerja.
5. Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigrasi.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis diatas mengerucut pada salah satu masalah pokok yaitu “Rendahnya Penyerapan Angkatan Kerja”. Secara jelas masalah dan pokok masalah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Penyerapan Angkatan Kerja	Rendahnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	1 Jumlah pencari kerja yang memiliki keahlian dan ketrampilan masih relatif kecil
		2 Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
		3 Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
		4 Kurangnya animo pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dalam memahami peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan
		5 Terbatasnya sumber daya manusia ketenagakerjaan (mediator, pengantar kerja dll)
		6 Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan kompetensi tenaga kerja
		7 Adanya pengangguran akibat terjadinya bencana
		8 Manajemen ketenagakerjaan daerah belum optimal
		9 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi dibidang ketenagakerjaan
		10 Terjadinya dinamika regulasi dibidang ketenagakerjaan
		11 Kurangnya sinergitas multi stakeholders
		12 Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dibidang ketenagakerjaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		13 Minimnya regulasi daerah terkait ketenagakerjaan
		14 Masih rendahnya pembinaan dan perlindungan terhadap PMI
		15 Masih rendahnya pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas
		16 belum optimalnya sistem pengelolaan data base tenaga kerja daerah
		17 Belum optimalnya fasilitasi penempatan transmigrasi
		18 Pemberangkatan serta penempatan calon transmigran menyesuaikan dengan jadwal pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta kesiapan daerah tujuan transmigrasi

3. Strategi Organisasi

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi yang telah ditetapkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja
3. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif
4. Meningkatkan fasilitasi penempatan transmigrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 menggunakan dasar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis. Terpilihnya Bupati baru pada tahun 2025 ditindaklanjuti dengan penetapan RPJMD dan Renstra baru untuk mengakomodir visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

Visi Bupati Lumajang Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Lumajang Yang Amanah, Manusiawi dan Berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Lumajang menetapkan 8 misi sebagai berikut :

1. Lumajang Melayani
2. Lumajang Tangguh
3. Lumajang Membangun
4. Lumajang Eksotik
5. Lumajang Peduli
6. Lumajang Unggul
7. Lumajang Lestari
8. Lumajang Lumbung Pangan

Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, mendukung misi 4 Lumajang Eksotik yaitu Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi wisata dan hilirisasi industri.

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang adalah Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dengan indikator kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Menurut UU No.13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika telah memasuki usia kerja yaitu berumur 15 tahun-64 tahun.

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator yang penting dalam perekonomian suatu negara. Produktivitas tenaga kerja merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan standar hidup masyarakat (Williams 2003). Produktivitas tenaga kerja suatu negara atau daerah biasanya dihitung dari ukuran output dibagi dengan jumlah tenaga kerja di negara atau daerah tersebut. Ukuran dari output yang biasa digunakan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran produktivitas tenaga kerja sangat diperlukan karena untuk mengetahui kondisi dan kemampuan suatu negara dalam merealisasikan cita-cita pembangunan bangsa yang ditinjau dari kemampuan sumber daya manusianya. Dengan demikian, perumusan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan akan lebih terarah. Apabila produktivitas tenaga kerja masih rendah, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan atau pelatihan tenaga kerja. Selain itu tata cara bekerja juga perlu diperbaiki serta diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan, apabila produktivitas tenaga kerja sudah tinggi, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan agar produktivitas yang sudah dicapai tidak menurun dan diharapkan bisa terus meningkat (Kemenaker 2016).

Tabel 2.1. Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA (RENJA)
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja (Data dari BPS)	41.40 Juta Rp/tenaga kerja

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 bahwa dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran, salah satunya perubahan anggaran dan terjadi pergantian atau mutasi pejabat. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD TA. 2026 pada tanggal 2 Desember 2025 maka ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026.

Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang melaksanakan 6 program, 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sumber dana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dengan alokasi anggaran APBD TA. 2026 sebesar Rp. 5,318,058,950.20. Dibandingkan dengan pagu P-APBD TA. 2025 yang sebesar Rp. 5,512,564,006.66 terdapat penurunan sebesar Rp. 194,505,056.46 yaitu adanya penurunan alokasi DBHCHT tahun 2026. Penjelasan lebih rinci Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Tahun 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
	Sasaran Strategis :					
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	220,899,500.60	DAU
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	3,000,000.00	DAU
				Program Penempatan Tenaga Kerja	100,249,250.00	DAU
				Program Hubungan Industrial	839,640,950.00	DAU & DBHCHT
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5,199,650.00	DAU
				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4,149,069,599.60	DAU
	JUMLAH				5,318,058,950.20	

Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran. Secara lebih jelas Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang beserta formulasi perhitungannya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD S/D TW I TAHUN 2026**

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja, menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan time schedule 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2026 telah mengacu dan sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2026.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan atau sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat, lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun. Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2026.

Pencapaian tujuan “Meningkatnya produktivitas tenaga kerja” dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yaitu realisasi 43.91 juta rp/tenaga kerja dari target 41.40 juta rp/tenaga kerja atau capaian 106.06% dengan kategori Sangat Tinggi. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi produktivitasnya menandakan tenaga kerja semakin produktif. Realisasi kinerja tujuan triwulan I tahun 2026 berdasarkan data sementara rilis data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang berdasarkan data ketenagakerjaan per bulan Agustus 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026. Hal ini dikarenakan update data dari BPS untuk data PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan pada bulan Februari tahun 2027.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2026 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 99.95% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2026, dengan Tujuan Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

1. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun berkenaan (Target dan realisasi kinerja Tahun 2026).

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran dalam kerangka perbandingan antara target dengan realisasi sehingga diperoleh angka capaian kinerja Tahun 2026, sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Target dibanding Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2026

No	Tujuan, Sasaran Strategis, Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
	TUJUAN :					
A	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	41.40 juta rp/tenaga kerja	43.91 juta rp/tenaga kerja	106.06%	Sangat Tinggi
	SASARAN :					
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%	96.92%	99.95%	Sangat Tinggi

Sumber : Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah data sementara berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2025, Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026. Realisasi Tingkat Kesempatan Kerja berdasarkan data Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025 (data diolah).

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kedua indikator baik indikator tujuan maupun sasaran memiliki predikat “Sangat Tinggi”. Sasaran kinerja yang ditetapkan dan dijabarkan dalam pelaksanaan beberapa program saling berkaitan dan tujuan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja serta menurunkan angka pengangguran. Keterkaitan hubungan antar sasaran program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dengan adanya pelatihan kompetensi bagi pencari kerja dan pembinaan LPK di Kabupaten Lumajang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan/kemampuan sumber daya manusia/calon tenaga kerja di Kab. Lumajang, sehingga mempunyai daya saing untuk berkompetisi dalam dunia kerja.
2. Penyerapan tenaga kerja dilakukan dengan melaksanakan pelayanan AK-1, Rekom ID CPMI, pembinaan Bursa Kerja Khusus, penyebarluasan lowongan pekerjaan dan memfasilitasi perusahaan dengan pencari kerja (mempertemukan melalui walk in interview) di Kantor Dinas Tenaga Kerja. Fasilitasi tersebut didalamnya termasuk untuk pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi.
3. Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban melindungi, menjaga keharmonisan hubungan antara pemberi kerja/perusahaan dengan tenaga kerja/buruh dan kesejahteraan tenaga kerja/buruh, melalui mekanisme antara lain : kepatuhan PP/PKB, penetapan UMK Kab. Lumajang, kepesertaan BPJS Kesehatan maupun ketenagakerjaan, mediasi perselisihan hubungan industrial, dll.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja antara Realisasi dan Capaian Kinerja s/d Triwulan I Tahun 2026 dibanding dengan Tahun Sebelumnya

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET P-RENSTRA / RENSTRA					REALISASI					CAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	TUJUAN :																
A	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.75%	2.50%	N/A	N/A	N/A	4.97%	3.67%	N/A	N/A	N/A	19.27 %	53.20 %	N/A	N/A	N/A
B	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	N/A	N/A	43.70 juta rp/tenaga kerja	43.77 juta rp/tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	41.38 juta rp/tenaga kerja	43.91 juta rp/tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	94.69%	100.32 %	N/A
C	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	N/A	N/A	N/A	41.37 juta rp/tenaga kerja	41.40 juta rp/tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	43.91 juta rp/tenaga kerja	43.91 juta rp/tenaga kerja	N/A	N/A	N/A	106.14 %	106.06 %
	SASARAN :																
1	Meningkatnya kualitas pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	100%	100%	N/A	N/A	N/A	95.00%	96.88%	N/A	N/A	N/A	95.00 %	96.88 %	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0.00%	3.74%	N/A	N/A	N/A	0.00%	3.74%	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja di sektor ketenagakerjaan	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	47%	48%	N/A	N/A	N/A	83.12%	83.83%	N/A	N/A	N/A	176.85 %	174.65 %	N/A	N/A	N/A
4	Meningkatnya hubungan industrial ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	68%	69%	76%	76%	N/A	73.05%	74.89%	75.61%	66.00%	N/A	107.43 %	108.54 %	99.49%	86.84%	N/A

NO	TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET P-RENSTRA / RENSTRA					REALISASI					CAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
5	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	100%	100%	N/A	N/A	N/A	0%	0%	N/A	N/A	N/A	0%	0.00%	N/A	N/A	N/A
6	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang kompeten	N/A	N/A	0.23%	0.28%	N/A	N/A	N/A	0.13%	0.17%	N/A	N/A	N/A	56.52%	60.71%	N/A
7	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	N/A	69.75%	69.76%	N/A	N/A	N/A	70.86%	69.64%	N/A	N/A	N/A	101.59%	99.83%	N/A
8	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	N/A	N/A	N/A	96.75%	96.97%	N/A	N/A	N/A	96.92%	96.92%	N/A	N/A	N/A	100.18 %	99.95%

Sumber : Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah angka sementara berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2025, Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026 dan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 (data diolah). Sedangkan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja berdasarkan data Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025.

3. Perbandingan antara Realisasi Tahun berkenaan dengan Target periode Akhir Renstra/P-Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Triwulan I Tahun 2026
dengan Target Periode Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Target Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5
	TUJUAN :			
A	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	43.91 juta rp/tenaga kerja	41.52 juta rp/tenaga kerja
	SASARAN :			
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.92%	97.25%

Sumber : Realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja adalah angka sementara berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2025, Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026 dan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2026 (data diolah).

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2026 dengan Target Akhir Periode Renstra Tahun 2030 dapat dilihat dari 2 indikator, 1 indikator mendekati target akhir tahun Renstra yang direncanakan dan 1 indikator telah melebihi target akhir tahun Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan dengan Standar Nasional/Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2026 dengan standar Nasional dan standar Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi
1	2	3	4	5	6
	TUJUAN :				
A	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	43.91 juta rp/tenaga kerja	89.33 juta rp/tenaga kerja	85.67 Juta rp/tenaga kerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2026	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi
	SASARAN :				
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.92%	95.26%	96.12%

Sumber :

1. Angka sementara berdasarkan data BPS Kab. Lumajang 2025, BPS Provinsi Jawa Timur 2025 berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2025, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2026, BPS Indonesia, Satu Data Kemenaker, Indikator Makro Sosial Ekonomi Jawa Timur Triwulan I 2025.
2. Realisasi Tingkat Kesempatan Kerja berdasarkan BRS BPS Keadaan Ketenagakerjaan bulan Agustus 2025, Data BPS Nasional bulan Nopember 2025.

Perbandingan pada tabel tersebut diatas adalah realisasi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2026 sebesar 43.91 juta rupiah/tenaga kerja dibandingkan dengan Tingkat Propinsi 85.67 juta rupiah/tenaga kerja dengan capaian 51.25%, dan dibandingkan dengan Tingkat Nasional sebesar 89.33 juta rupiah/tenaga kerja dengan capaian 49.15%. Untuk indikator sasaran Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Lumajang tahun 2026 sebesar 96.92% dibandingkan dengan Tingkat Kesempatan Kerja Nasional sebesar 95.26% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 96.12%. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kota sekitar dalam hal ini Kabupaten Jember yang realisasi Tingkat Kesempatan Kerja sebesar 96.93% dan Kabupaten Probolinggo sebesar 97.08%, realisasi Kabupaten Lumajang masih dibawah dua kabupaten tersebut akan tetapi mendekati realisasi dua kabupaten terdekat tersebut. Tingkat Kesempatan kerja merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi mencerminkan kondisi ekonomi yang baik dan kesejahteraan penduduk yang lebih baik, karena semakin banyak orang yang memiliki pekerjaan. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesempatan kerja mengindikasikan adanya pengangguran yang tinggi dan potensi keterpurukan ekonomi.

- **CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD**

Analisis program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sampai dengan triwulan I tahun 2026 disertai uraian penjelasan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program yang Menunjang Kinerja Sasaran OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tw 1 2026	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%	96.92%	99.95%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0.00%	0.00%	0.00%
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.03%	0.01%	33.16%
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	24.54%	99.78%	406.61%
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10.00%	61.09%	610.91%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tw 1 2026	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
							Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	3.00%	15.80%	526.51%
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Ketransmigrasian	0.00%	0.00%	0.00%
						Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	22.00%	24.78%	112.63%

• PENYAJIAN DATA KINERJA

a. Tujuan

Tabel 3.7

Data Kinerja Tujuan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Penghitungan Kinerja
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja	$\frac{27,317,850.00}{622,064} = 43.91 \text{ juta rp/tenaga kerja}$

Sumber : Berdasarkan data BRS BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus Tahun 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026

b. Sasaran

Tabel 3.8
Data Kinerja Sasaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Penghitungan Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100	$\frac{622064 \text{ orang}}{641835 \text{ orang}} \times 100 = 96.92\%$	Berdasarkan data BRS BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus Tahun 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026

3.2. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja antara realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2026 yang dibandingkan dengan target tahun 2026, diketahui bahwa indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

● ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. TUJUAN

Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yaitu Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas tenaga kerja, dengan Indikator Tujuan : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja.

Faktor pendukung tercapainya kinerja adalah :

1. Adanya pelatihan bagi pencari kerja
2. Publikasi informasi ketenagakerjaan
3. Dukungan program dan kegiatan dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dinas provinsi
4. Fasilitasi perusahaan dan pencari kerja

b. SASARAN

1. Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- ✓ Adanya dukungan dana cukai DBHCHT.
- ✓ Publikasi pelatihan yang optimal melalui medsos.
- ✓ Bertambahnya jumlah LPK dan BLK Komunitas.
- ✓ Keterlibatan pihak stakeholder dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
- ✓ Tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi disabilitas.
- ✓ Kesadaran perusahaan akan pentingnya penyusunan PP dan PKB.
- ✓ Mediasi penyelesaian perselisihan HI yang efektif.
- ✓ Koordinasi yang baik dengan BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan).
- ✓ Koordinasi yang baik antar Instansi dalam pemenuhan kebutuhan data dan informasi.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- a. **TUJUAN**

Faktor penghambat tercapainya kinerja adalah :

1. Rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi di bidang ketenagakerjaan :
 - Belum semua perusahaan menerapkan upah sesuai UMK
 - Belum semua perusahaan ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 - Belum semua perusahaan membuat PP/PKB/PKWT
2. Belum adanya pemetaan antara kebutuhan tenaga kerja dengan lulusan sehingga terjadi ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja (berdasarkan Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi).

- b. **SASARAN**

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja

Faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- Minimnya pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan.
- Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi sehingga apabila ada pelaksanaan uji kompetensi harus ke BLK Provinsi atau wilayah.
- Minimnya data tenaga kerja kompeten yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja.
- Adanya kesenjangan antara TPAK perempuan dan TPAK laki-laki.
- Belum semua perusahaan mempekerjakan tenaga disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola kerja yang layak.
- Belum optimalnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
- Belum optimalnya pembinaan kepada perusahaan terkait tata kelola kerja yang layak.

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

- a. TUJUAN**

1. Mengadakan pelatihan bagi pencari kerja.
2. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan terkait regulasi dibidang ketenagakerjaan.
3. Mendorong pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).
4. Mengintegrasikan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ke dalam RPJMD dan RKPD.

- b. SASARAN**

1. Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja

Upaya atau solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja sasaran Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengusulkan penambahan jumlah pelatihan berbasis kompetensi.
- ✓ Memberdayakan BLKK dan LPK binaan Dinas Tenaga Kerja.
- ✓ Meningkatkan pendataan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada perusahaan.
- ✓ Meningkatkan kompetensi untuk TPAK Perempuan.
- ✓ Melaksanakan pembinaan kepada perusahaan tentang penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- ✓ Meningkatkan pembinaan tata kelola kerja.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi.
- ✓ Mengusulkan penambahan JF mediator kepada BKD.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan bpjs ketenagakerjaan dan kesehatan terkait kepatuhan kepesertaan jaminan sosial.

- **ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan anggaran yang cukup pada tahun 2026. Efisiensi atas setiap capaian sasaran dan anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran dengan Capaian Kinerja Anggaran s/d Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran APBD				Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%	96.92%	99.95	1,362,393,112.60	894,240,046.00	65.64	34.36	34.31

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja (diolah).

Dari tabel tersebut diatas, dari sasaran Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja menunjukkan efisiensi positif sebesar 34.31%. Hal ini menunjukkan Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dibidang ketenagakerjaan. Pagu anggaran tersebut adalah total belanja Dinas Tenaga Kerja pada triwulan I tahun 2026. Disamping anggaran belanja, Dinas Tenaga Kerja juga mengelola pendapatan yaitu pendapatan Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA).

• ANALISIS PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN

Tabel 4

Analisis Program Penunjang Keberhasilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang secara Langsung/ Menunjang secara tidak langsung	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
1	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%	96.92%	99.95%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0.00%	0.00%	0.00%	Menunjang secara langsung	1. Belum adanya petugas/aparatur Dinas Tenaga Kerja yang menguasai penyusunan RTKD 2. Adanya rencana penambahan pagu anggaran program pada perubahan APBD tahun 2026
						Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.03%	0.01%	33.16%	Menunjang secara langsung	1. Pelatihan kompetensi hanya bersumber dana DAU 2. Masih terbatasnya data tenaga kerja kompeten yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada triwulan III
						Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar	24.54%	99.78%	406.61%	Menunjang secara langsung	1. Keterlibatan pihak stakeholder dalam upaya penyerapan tenaga kerja 2. Tersedianya kesempatan kerja yang sesuai dengan kondisi disabilitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang secara Langsung/ Menunjang secara tidak langsung	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
							Kerja dalam wilayah Kabupaten					
						Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Ketransmigrasian	0.00%	0.00%	0.00%	Menunjang secara langsung	1. Penetapan kuota pemberangkatan calon transmigran oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi 2. Adanya perubahan nomenklatur Kementerian dan perubahan kebijakan baru transmigrasi
						Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	22.00%	24.78%	112.63%	Menunjang secara tidak langsung	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Tenaga Kerja
						Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	10.00%	61.09%	610.91%	Menunjang secara langsung	1. Kurangnya kesadaran dari pengusaha dan pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Buruh akan pentingnya PP dan PKB 2. Kurang disiplinnya perusahaan dalam menerapkan norma-norma ketenagakerjaan 3. Rasio pembina (mediator) dengan jumlah perusahaan sangat kurang
							Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	3.00%	15.80%	526.51%	Menunjang secara langsung	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)	Menunjang secara Langsung/ Menunjang secara tidak langsung	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
												4. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Analisis atas kinerja 1 (satu) sasaran dan program penunjang keberhasilan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

A. Sasaran : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja sasaran adalah Tingkat Kesempatan Kerja dengan target 96.97% dan terealisasi 96.92%, capaian kinerja 99.95%. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2026 berasal dari data Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026. Formulasi perhitungan indikator Tingkat Kesempatan Kerja adalah jumlah penduduk bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Jumlah penduduk bekerja sebanyak 622064 orang dibagi jumlah angkatan kerja sebanyak 641835 orang dikali 100 yaitu 96.92%.

Indikator ini didukung oleh 6 program yaitu 5 program teknis dan 1 program penunjang sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan indikator Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dengan target 0% dan realisasi 0.00% atau dengan capaian 0.00%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100. Kegiatan pada program ini adalah penyusunan Dokumen RTK Makro, yang rencana dijadwalkan pada triwulan IV tahun 2026.
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi dengan target 0.03% dan terealisasi 0.01%, capaian kinerja 33.16%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100. Realisasi jumlah pencari kerja yang bersertifikat kompetensi berasal dari pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sebanyak 0 orang (karena jadwal pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2026) dan calon Pekerja Migran Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi triwulan I tahun 2026 sebanyak 62 orang sehingga total Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 62 orang dan jumlah tenaga kerja menurut BPS sebanyak 622064 orang. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi dari target 0 orang yang lulus uji kompetensi sebanyak 0 orang, capaian sebesar 0.00%. Sumber dana untuk kegiatan ini adalah dana DAU sebesar Rp. 220,899,500.60 dengan peruntukan 1 paket pelatihan, pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, dan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama.

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 dalam tahap persiapan kegiatan, yang telah realisasi adalah pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Sedangkan untuk pelaksanaan pelatihan dijadwalkan pada triwulan III tahun 2026.

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang sesuai standar dari target 7.69% terealisasi 10.71% atau dengan capaian 139.27%. Formulasi perhitungan indikator kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang sesuai standar sebanyak 3 LPK dibagi jumlah Lembaga Pelatihan Kerja keseluruhan sebanyak 28 LPK dikali 100.

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahun 2026 sebanyak 2 aktivitas yaitu pembinaan LPK dan sosialisasi LPK. Perijinan LPK/BLKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission). Sampai dengan triwulan I tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang telah melaksanakan pembinaan pada 3 lembaga LPK maupun BLKK yang ada di Kabupaten Lumajang. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang juga berupaya untuk memotivasi agar LPK segera berproses akreditasi maupun perijinan OSS.

c. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Persentase Perusahaan kecil yang Terlayani Konsultasi Produktivitas dari target 0% terealisasi 0.00% atau dengan capaian 0.00%. Formulasi perhitungan indikator kegiatan ini adalah Jumlah perusahaan kecil yang terlayani konsultasi produktivitas dibagi Jumlah seluruh perusahaan kecil dikali 100. Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan II tahun 2026.

d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah tenaga kerja yang diukur produktifitasnya dari target 0 orang terealisasi 0.00 orang atau dengan capaian 0.00%. Hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan II tahun 2026.

3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator program adalah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten dengan target kinerja triwulan I tahun 2026 adalah 24.54% terealisasi 99.78%, capaian kinerja 406.61%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 911 orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 913 orang. Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:

a. Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi melalui kegiatan layanan antar kerja dalam negeri dengan target 1023 orang dan realisasi 858 orang atau tercapai 83.87%, yang berasal dari hasil fasilitasi rekrutmen oleh beberapa perusahaan, penempatan tenaga kerja disabilitas dan data Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dari bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Kinerja ini dicapai dengan memaksimalkan koordinasi dan fasilitasi terhadap perusahaan yang melakukan rekrutmen karyawan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang, disamping itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang juga melakukan sosialisasi melalui HRD tentang Ketenagakerjaan kepada Perusahaan Swasta dan BUMD yang selama ini belum sepenuhnya melaporkan lowongan dan penyerapan tenaga kerja termasuk Penyandang Disabilitas dengan harapan Wajib Lapor Lowongan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja oleh perusahaan lebih tertib untuk dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.

b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah pengguna data informasi pasar kerja dengan target 130 pengguna dan realisasi 182 pengguna atau tercapai 140%. Data tersebut terdiri dari Pencari kerja, perusahaan dan Pemerintah. Dimana data pencari kerja adalah AK1, Data perusahaan adalah lowongan pekerjaan dan Data Penempatan, Data Pemerintah adalah data Informasi Pasar kerja. Aktivitas kegiatan ini adalah Walk in Interview yang pelaksanaannya pada triwulan II sd triwulan IV tahun 2026.

c. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah CPMI/PMI, PMI purna yang difasilitasi dengan target 135 orang dan realisasi 85 orang atau tercapai 62.96%. Data untuk kegiatan ini berdasarkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan layanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Aktivitas kegiatan ini adalah sosialisasi pelindungan CPMI sebanyak 2 kegiatan dan Fasilitasi pemulangan PMI bermasalah (deportasi/meninggal/sakit). Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah menunjukkan kenaikan dikarenakan kurangnya informasi layanan kerja ke luar negeri, terbatasnya akses informasi pasar kerja (dalam dan luar negeri), maraknya praktek percaloan, masih rendahnya pendidikan masyarakat, keinginan untuk proses administrasi yang cepat dan instan serta kesulitan ekonomi (terlilit hutang) sehingga tidak mempertimbangkan resiko untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman dan masyarakat cenderung menempuh jalur prosedural.

4. Program Hubungan Industrial

Indikator program terdapat 2 indikator adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan target 10.00% dan terealisasi 61.09% atau capaian 610.91%. Formulasi perhitungan adalah Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 672 perusahaan dibagi jumlah seluruh perusahaan sebanyak 1100 perusahaan dikali 100. Dan Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan target 3.00% dan realisasi 15.80% atau capaian 526.51%, formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah peserta

jaminan sosial ketenagakerjaan aktif 87688 orang dibagi jumlah keseluruhan tenaga kerja 555154 dikali 100.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Hubungan Industrial adalah sebagai berikut :

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator program ini adalah Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian dimana sampai dengan triwulan I tahun 2026 dengan target 0.00% dan terealisasi 0.00%. Kinerja program ini didukung dengan 1 kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan pada program ini hanya penyuluhan transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan ini menunggu penetapan perubahan nomenklatur Kementerian terkait kebijakan program kegiatan transmigrasi.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator program ini adalah Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dimana sampai dengan triwulan I tahun 2026 dengan target 22.00% dan terealisasi 24.78%. Kinerja program ini didukung dengan 6 kegiatan. Realisasi kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

● **REALISASI ANGGARAN**

Capaian keuangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dengan pagu anggaran APBD triwulan I tahun 2026 sebesar Rp. 1,362,393,112.60 dan realisasi total sebesar Rp. 894,240,046.00 (Delapan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu empat puluh enam rupiah) atau sebesar 65.64%. Pada tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mengelola pendapatan yaitu Retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA). Prinsip dasar penetapan alokasi anggaran adalah kesesuaian antara prioritas pembangunan dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Pada tabel di bawah ini disajikan

Realisasi anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang s/d Triwulan I Tahun 2026

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
	TOTAL PENDAPATAN	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	
2.07.2.07.00.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	
2.07.2.07.00.00.00.4.1.0 2	Retribusi Daerah	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	
2.07.2.07.00.00.00.4.1.0 2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	
2.07.2.07.00.00.00.4.1.0 2.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA)	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	
2.07.2.07.00.00.00.4.1.0 2.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing TKA)	178,200,000.00	60,804,000.00	34.12	DAU
	TOTAL PAGU BELANJA	1,362,393,112.60	894,240,046.00	65.64	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	3,000,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	3,000,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	3,000,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	15,099,900.00	12,936,000.00	85.67	DAU
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5,100,000.00	5,400,000.00	105.88	DAU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	5,100,000.00	5,400,000.00	105.88	DAU
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	0.00	0.00		DAU
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9,999,900.00	7,536,000.00	75.36	DAU
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	9,999,900.00	7,536,000.00	75.36	DAU
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	30,573,950.00	9,663,000.00	31.61	DAU
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	20,778,750.00	8,370,000.00	40.28	DAU
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	19,740,750.00	8,370,000.00	42.40	DAU
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	1,038,000.00	0.00	0.00	DAU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	9,795,200.00	1,293,000.00	13.20	DAU
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9,795,200.00	1,293,000.00	13.20	DAU
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	17,893,000.00	12,477,000.00	69.73	DAU & DBHCHT
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17,052,000.00	12,477,000.00	73.17	DAU
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5,000,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	12,052,000.00	12,477,000.00	103.53	DAU & DBHCHT
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	841,000.00	0.00	0.00	DAU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	166,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	675,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0.00	0.00	0.00	DBHCHT
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0.00	0.00	0.00	DAU
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00	DAU
3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,295,826,262.60	859,164,046.00	66.30	DAU
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,286,000.00	3,480,000.00	65.83	DAU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	DAU
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	DAU
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1,806,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,051,467,874.00	757,843,431.00	72.07	DAU
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,031,343,124.00	746,753,681.00	72.41	DAU
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,795,000.00	6,130,000.00	47.91	DAU
2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,185,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,959,750.00	4,959,750.00	100.00	DAU
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1,185,000.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,002,000.00	752,000.00	75.05	DAU

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	APBD TA. 2026			Ket.
		Pagu Tw 1 tahun 2026	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	0.00	0.00	DAU
2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,002,000.00	752,000.00	75.05	DAU
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48,621,032.60	25,804,239.00	53.07	DAU
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,257,738.00	4,191,018.00	98.43	DAU
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,149,570.60	14,908,386.00	44.97	DAU
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,821,725.00	2,273,835.00	80.58	DAU
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,391,999.00	4,431,000.00	52.80	DAU
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,842,356.00	52,462,663.00	38.91	DAU
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,525,000.00	8,984,416.00	57.87	DAU
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119,317,356.00	43,478,247.00	36.44	DAU
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,607,000.00	18,821,713.00	34.47	DAU
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,407,000.00	12,071,713.00	29.88	DAU
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,200,000.00	6,750,000.00	47.54	DAU

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2026, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, pekerja/buruh dan stakeholders yang bergerak dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dituangkan dalam 6 program, 17 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Pencapaian tujuan “Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja” dengan indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yaitu realisasi 43.91 juta rp/tenaga kerja dari target 41.40 juta rp/tenaga kerja atau capaian 106.06% dengan kategori Sangat Tinggi. Dilihat dari capaian 1 sasaran, yaitu Meningkatkan Serapan Tenaga Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja dengan target 96.97% dan terealisasi 96.92%, capaian kinerja 99.95% dengan kategori Sangat Tinggi. Realisasi kinerja tujuan berdasarkan data sementara BRS BPS Keadaan Ketenagakerjaan bulan Agustus Tahun 2024 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026. Hal ini dikarenakan update data PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dari BPS baru terbit pada bulan Februari tahun 2027. Sedangkan realisasi Tingkat Kesempatan Kerja berdasarkan data BRS BPS Keadaan Ketenagakerjaan bulan Agustus Tahun 2025.

Dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026 masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dan lintas Perangkat Daerah.

2. Meningkatkan kuota peserta pelatihan ketrampilan dari berbagai sumber dana dan menambah jenis pelatihan ketrampilan yang diminati masyarakat pencari kerja di kabupaten Lumajang.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.
4. Meningkatkan pembinaan kepada perusahaan dan pekerja/buruh.
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait ketenagakerjaan.
6. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan perusahaan-perusahaan baik yang ada di Kabupaten Lumajang maupun diluar Kabupaten Lumajang.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2026 ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya tahun berkenaan dan tahun berikutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 2 April 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja



SUBECHAN, SE, MM

Pembina / IV/a

NIP. 19710808 199203 1 007

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBECHAN, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH AMPERAWATI

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 Januari 2026



Pihak Kedua,

INDAH AMPERAWATI



Pihak Pertama,

SUBECHAN, SE, MM

NIP. 19710808 199203 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96.97%

Program		Anggaran	Keterangan
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	220,899,500.60	DAU
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	100,249,250.00	DAU
3. Program Hubungan Industrial	Rp	839,640,950.00	DAU & DBHCHT
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	5,199,650.00	DAU
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	4,149,069,599.60	DAU
JUMLAH	Rp.	5,318,058,950.20	

Lumajang, 2 Januari 2026



MATRIK TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2029

TC. 25					TC.26					Tabel T-C.27																						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target					Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi Penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi					
					2025	2026	2027	2028	2029										2030	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja	41.37	41.40	41.44	41.47	41.49	41.52																						
Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	Jumlah penduduk bekerja dibagi Jumlah angkatan kerja dikali 100	96.75	96.97	97.04	97.11	97.18	97.25	1. Meningkatkan kualitas SDM pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi 2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja 3. Meningkatkan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Peningkatan pembinaan dan pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota 4. Peningkatan Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota 5. Optimalisasi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 6. Peningkatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 7. Peningkatan perluasan kesempatan kerja 8. Peningkatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9. Pencapaian dan Peningkatan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 10. Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2.07.02	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK/D dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100	Persen	N/A	N/A	40	50	65	75	100	100						Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	
											2.07.02.01	Tersedianya dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang sesuai ketentuan (kepmenaker no 52 Tahun 2014 dan kepmenaker no per.16/men/k/2010)	Dokumen	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi					
											2.07.02.2.0	Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	N/A	N/A	1						1	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja					
											2.07.02.2.0	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Facilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	N/A	10	15	20	25	30	35	135	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja						
											2.07.03	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100	Persen	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas						
											2.07.03.2.0	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasar Unit Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi	Orang	120	96	96	96	96	96	96	555	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas							
											2.07.03.2.0	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	120	80	100	100	100	100	100	580	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja & BLK Jember						
											2.07.03.2.0	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	lembaga	N/A	-	1	2	2	3	3	11	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kab. Lumajang						
											2.07.03.2.0	Terwujudnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Sesuai Standar	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang sesuai standar	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang sesuai standar dibagi jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) keseluruhan dikali 100	Persen	23.08	26.92	30.77	34.62	38.46	42.31	46.15	46.15	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas							

TC.25					TC.26					Tabel T-C.27																	
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target					Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi
					2025	2026	2027	2028	2029										2030	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
											2.07.03.2.0 2.0001	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	26	26	25	27	28	29	30	30	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kab. Lumajang	
											2.07.03.2.0 4	Terlayannya Kebutuhan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang Terlayani Konsultasi Produktivitas	Jumlah perusahaan kecil yang terlayani konsultasi produktivitas dibagi Jumlah seluruh perusahaan kecil dikali 100	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	100	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas		
											2.07.03.2.0 4.0001	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	N/A	20	20	20	20	20	20	100	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kab. Lumajang	
											2.07.03.2.0 5	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktifitasnya	Jumlah tenaga kerja yang diukur produktifitasnya	Orang	0	0	100	100	100	100	100	500	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas		
											2.07.03.2.0 5.0001	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5	Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.04	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100	Persen	98.13	98.15	98.17	98.19	98.22	98.25	98.27	98.27	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		
											2.07.04.2.0 1	Terlaksananya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi melalui kegiatan layanan antar kerja dalam negeri	Jumlah Tenaga Kerja yang difasilitasi melalui kegiatan layanan antar kerja dalam negeri	Orang	781	10212	10332	10477	10632	10797	10982	63432	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		
											2.07.04.2.0 1.0001	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pegantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	N/A	40	40	40	40	40	40	200	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.04.2.0 1.0002	Terwujudnya Pelayanan antar kerja	Pelayanan Antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja dan AKL	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL)	Orang	751	10110	10230	10375	10530	10695	10880	62820	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang	
											2.07.04.2.0 1.0004	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketengakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketengakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	30	2	32	32	32	32	32	162	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang	
											2.07.04.2.0 1.0005	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	120	0	50	50	50	50	50	250	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang	
											2.07.04.2.0 3	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengguna data informasi pasar kerja	Jumlah pengguna data informasi pasar kerja	Pengguna	N/A	550	555	560	565	570	575	3375	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		
											2.07.04.2.0 3.0001	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	1	6	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang	
											2.07.04.2.0 3.0002	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Sistem Online (Siap Kerja)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Siap Kerja)	Orang	N/A	210	215	220	225	230	235	1335	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		

TC.25					TC.26		Tabel T-C.27																					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target						Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi Penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
												2.07.05.2.0 2.0001	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	3	3	3	3	3	3	3	3	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Lumajang	
											2.07.05.2.0 2.0002	Terselenggaranya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Perkara	12	12	13	14	15	16	17		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Lumajang		
											2.07.05.2.0 2.0003	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pekerja yang Diverifikasi	Jumlah Asosiasi Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	N/A	N/A	1	1	2	2	3		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Lumajang		
											2.07.05.2.0 2.0004	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Jumlah Terlaksananya program kegiatan LKS Tripartit	Lembaga	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Lumajang	
											2.07.05.2.0 2.0005	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	N/A	N/A	5606	5800	5850	5900	5960		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kab. Lumajang		
											3.32.03	Meningkatnya Fasilitas Ketransmigrasian	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian dibagi Jumlah Masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian dikali 100	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		
											3.32.03.2.0 1	Meningkatnya kualitas transmigran yang ditempatkan	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase transmigran terlihat yang ditempatkan	Jumlah transmigran terlihat yang ditempatkan dibagi jumlah transmigran yang terlihat di tahun n dikali 100	Persen	0	0	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi		
											3.32.03.2.0 1.0001	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	1	1	1	1	1		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Luar Kab. Lumajang		
											3.32.03.2.0 1.0004	Terlaksananya Penempatan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penempatan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	0	0	2	2	2	2	2		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Luar Kab. Lumajang		
											3.32.03.2.0 1.0006	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK	0	0	10	10	10	10	10	10		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	
											3.32.03.2.0 1.0009	Terlaksananya Penajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Penajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penajakan	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penajakan	Lokasi	0	0	1	1	1	1	1	1		Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Luar Kab. Lumajang	

TC. 25					TC.26		Tabel T-C.27																							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target						Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi Penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi		
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										Target	Target	Target	Target	Target	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
												3.32.03.2.0.1.0010	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asli	Penyuluhan Program Transmigrasi yang Mendapatkan Penyuluhan Penduduk Asli	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah Transmigran Penduduk Asli yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang	0	0	20	20	20	20	20	20	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang			
												3.32.03.2.0.1.0011	Terlaksananya Pendaftaran Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis dalam Transmigran Penduduk Asli	Pendaftaran Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis dalam Transmigran Penduduk Asli	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK	0	2	2	2	2	2	2	2	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja			
												3.32.03.2.0.1.0014	Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK	0	0	2	2	2	2	2	2	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang			
												3.32.03.2.0.1.0016	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Cik Kesehatan Calon Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK	0	0	2	2	2	2	2	2	2	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang		
												3.32.03.2.0.1.0018	Terlaksananya Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK	0	0	2	2	2	2	2	2	2	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Luar Kab. Lumajang		
												3.32.03.2.0.1.0019	Terlaksananya Bantuan Permodalan Dalam Bentuk Uang Saku	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket	0	0	2	2	2	2	2	2	2	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Kab. Lumajang		
												3.32.03.2.0.1.0020	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi	0	-	1	1	1	1	1	1	1	Bidang Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Luar Kab. Lumajang		
												2.07.01	Terselenggaranya fasilitas kebutuhan operasional kantor	Program Penunjang Jusunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat		
												2.07.01.2.0.1	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	113.33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perencana	
												2.07.01.2.0.1.0001	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Tahun N	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Tahun N	Dokumen	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	Perencana	Dinas Tenaga Kerja	
												2.07.01.2.0.1.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dalam Tahun N	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perencana	Dinas Tenaga Kerja	
												2.07.01.2.0.1.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam Tahun N	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Perencana	Dinas Tenaga Kerja	

TC.25						TC.26		Tabel T-C.27																					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target						Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi Penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
												2.07.01.2.0.5	Terpenuhi administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	24	Subag Umum Kepegawaian	
											2.07.01.2.0.5.0002	Tersedianya Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan dalam Tahun N	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan dalam Tahun N	Paket	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.5.0009	Tertekannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Tahun N	Orang	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.6	Terpenuhi administrasi umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100	Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Subag Umum Kepegawaian		
											2.07.01.2.0.6.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.6.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	2	3	3	3	3	3	3	3	3		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.6.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan dalam Tahun N	Paket	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.6.0009	Tertekannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Tahun N	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.7	Terpenuhi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Subag Umum Kepegawaian		
											2.07.01.2.0.7.0006	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan dalam Tahun N	Unit	N/A	2	10	10	10	10	10	10	10		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.8	Terpenuhi fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Subag Umum Kepegawaian		
											2.07.01.2.0.8.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.8.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dalam Tahun N	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
											2.07.01.2.0.9	Terpenuhi pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Subag Umum Kepegawaian		

TC. 25					TC.26		Tabel T-C.27																					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target						Strategi	Kebijakan	Kode	Sasaran Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Formulasi penghitungan	Satuan	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode	Unit Kerja	Lokasi
					2025	2026	2027	2028	2029	2030										Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	24	25	27	
												2.07.01.2.0 9.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Periznannya dalam Tahun N	Unit	18	18	18	18	18	18	18		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
												2.07.01.2.0 9.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dalam Tahun N	Unit	53	12	28	28	28	28	28		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	
												2.07.01.2.0 9.0009	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dalam Tahun N	Unit	NA	1	1	1	1	1	1		Subag Umum Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja	



Formulasi Penghitungan Kinerja Tujuan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan atas dasar harga konstan dibagi jumlah tenaga kerja	41.40 Juta Rp/tenaga kerja	PDRB Tahun berjalan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 27,317,850.00 dibagi jumlah tenaga kerja sebanyak 622,064 orang	43.91 juta rp/tenaga kerja	106.06%

Sumber : Angka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026

Katalog/Catalogue: 1102001.3508

ISSN: 0215-5648

KABUPATEN LUMAJANG DALAM ANGKA

Lumajang Regency in Figures

2025

Volume 46, 2025



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUMAJANG
BPS-STATISTICS LUMAJANG REGENCY**

KATA PENGANTAR



Kabupaten Lumajang Dalam Angka 2025 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lumajang. Disadari bahwa publikasi ini belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak pemakai data khususnya para perencana, namun diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan.

Lumajang, Februari 2025
Kepala BPS
Kabupaten Lumajang



MOCHAMAD SONHAJI

12

SISTEM NERACA REGIONAL

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan 7,45%

2023

**40.072,78
Miliar Rupiah**

2024

**43.059,45
Miliar Rupiah**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2023 hingga 2024 mengalami peningkatan 4,52%

2023

**24.808,35
Miliar Rupiah**

2024

**25.929,92
Miliar Rupiah**

Persentase terbesar PDRB ADHB pada tahun 2024

**Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan 31,82%**

Tabel
Table 12.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lumajang (miliar rupiah), 2020–2024
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Industry in Lumajang Regency (billion rupiahs), 2020–2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	7.250,66	7.278,51	7.235,12	7.414,11	7.363,45
B Pertambangan dan Renggalian/Mining and Quarrying	864,28	879,28	958,30	1.017,09	1.088,08
C Industri Pengolahan/Manufacturing	4.650,16	4.923,08	5.329,86	5.718,90	6.157,11
D Rengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	11,84	12,16	12,98	13,76	14,55
E Rengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	13,91	15,13	15,63	16,02	16,80
F Konstruksi/Construction	1.544,76	1.591,28	1.702,92	1.812,80	1.943,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3.161,71	3.328,27	3.541,13	3.757,41	3.969,54
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	439,31	474,77	551,92	609,25	675,01
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	281,35	291,32	321,77	343,92	369,01
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	1.040,80	1.107,25	1.160,87	1.235,90	1.322,43

Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	378,81	382,29	389,65	398,18	410,30
L	Real Estat/Real Estate Activities	414,01	427,79	449,43	466,27	481,65
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	71,79	73,06	74,77	82,10	87,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	682,93	684,24	686,48	686,68	726,44
P	Jasa Pendidikan/Education	607,50	610,74	609,47	619,07	641,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	189,16	198,81	204,51	213,05	226,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	330,82	345,41	381,79	403,83	437,12
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		21.933,79	22.623,40	23.626,58	24.808,35	25.929,92

Catatan/Note: * Data 2023: Angka Sementara/ Preliminary Figures

** Data 2024: Angka sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistical Indonesia, various census, survey, and other sources



Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang Agustus 2024

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,28 persen
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,86 persen

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Lumajang pada Agustus 2024 sebesar 915.298 orang atau mengalami kenaikan 6.605 orang dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lumajang. Sebanyak 648.582 orang atau sekitar 70,86 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Lumajang pada Agustus 2024 terdiri dari 627.319 orang bekerja dan 21.263 orang menganggur.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 26.209 orang dibandingkan Agustus 2023. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 27.772 orang dan penurunan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 1.563 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,86 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,37 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 88,50 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 53,91 persen.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024

StatusKeadaan Hetenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2022–Ags 2023		Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(9)
PendudukUsia Kerja	840.947	908.693	915.298	67.746	8,06	6.605	0,01
AngkatanKerja	586.536	622.373	648.582	35.837	6,11	26.209	0,04
- Bekerja	557.378	599.547	627.319	42.169	7,57	27.772	0,05
- Pengangguran	29.158	22.826	21.263	-6.332	-21,72	-1.563	-0,07
Bukan Angkatan Kerja	254.411	286.320	266.716	31.909	12,54	-19.604	-0,07
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,97	3,67	3,28	-1,30		-0,39	
- Laki-laki	5,91	3,96	3,44	-1,95		-0,52	
- Perempuan	3,58	3,19	3,03	-0,39		-0,16	
Tingkat Partisipasi AngkatanKerja (TPAK)	69,75	68,49	70,86	-1,26		2,37	
- Laki-laki	86,16	86,69	88,5	0,53		1,81	
- Perempuan	54,40	50,99	53,91	-3,41		2,92	

**Formulasi Penghitungan Kinerja Sasaran
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk bekerja dibagi Jumlah Angkatan kerja dikali 100	96.97%	Jumlah penduduk bekerja sebanyak 622064 orang dibagi Jumlah angkatan kerja sebanyak 641835 orang dikali 100	96.92%	99.95%

Sumber : Angka berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Keadaan Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2025 dan Kabupaten Lumajang Dalam Angka Tahun 2026

**JUMLAH TENAGA KERJA KESELURUHAN (BADAN PUSAT STATISTIK)
TAHUN 2025**



**BERITA
RESMI
STATISTIK**

No.14/12/3505/Th. XXXX, 2 Desember 2025



**Keadaan Ketenagakerjaan
Kabupaten Lumajang
Agustus 2025**

- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,64 persen
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,08 persen.
-

1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. PUK di Kabupaten Lumajang pada Agustus 2025 sebesar 921.597 orang atau mengalami kenaikan 6.299 orang dibandingkan kondisi Agustus 2024. Sebanyak 641.835 orang atau sekitar 69,64 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Lumajang pada Agustus 2025 terdiri dari 622.064 orang bekerja dan 19.771 orang menganggur.

Terjadi penurunan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 6.747 orang dibandingkan Agustus 2024. Dalam hal ini, terjadi pengurangan penduduk bekerja sebesar 5.255 orang dan penurunan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 1.492 orang.

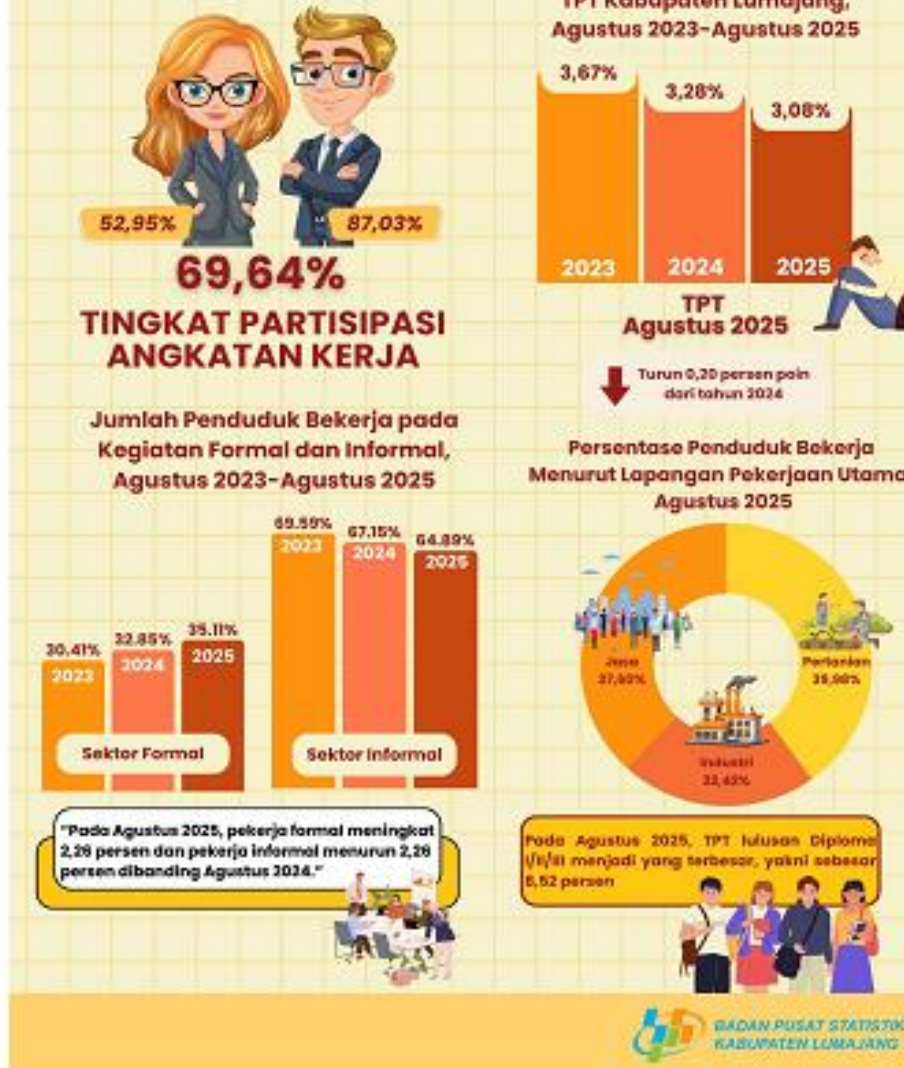
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2025 sebesar 69,64 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dibandingkan TPAK Agustus 2024. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok TPAK laki-laki dengan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,03 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 52,95 persen.

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2023–Agustus 2025

Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2023	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan		Perubahan	
	orang	orang	orang	Ags 2023–Ags 2025	Ags 2024–Ags 2025	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	908.693	915.298	921.597	12.904	1,42	6.299	0,69
Angkatan Kerja	622.373	648.582	641.835	19.462	3,13	-6.747	-1,04
- Bekerja	599.547	627.319	622.064	22.517	3,76	-5.255	-0,84
- Pengangguran	22.826	21.263	19.771	-3.055	-13,38	-1.492	-7,02
Bukan Angkatan Kerja	286.320	266.716	279.762	-6.558	-2,29	13.046	4,89
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,67	3,28	3,08	-0,59		-0,20	
- Laki-laki	5,91	3,44	2,49	-3,42		-0,95	
- Perempuan	3,58	3,03	4,01	0,43		0,98	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,75	70,86	69,64	-0,11		-1,22	
- Laki-laki	86,16	88,50	87,03	0,87		-1,47	
- Perempuan	54,40	53,91	52,95	-1,45		-0,96	

KEADAAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN LUMAJANG, AGUSTUS 2025

Berita Resmi Statistik No. 14/12/3508/Th. XXIX, 2 Desember 2025



Gambar 7 Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Agustus 2025



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Mochamad Sonhaji, B.Sc., M.Sc.
Kepala BPS Kabupaten Lumajang

☎ (0334) 881906

✉ sonhaji@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan petadigital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Di larang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menganggarkan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUMAJANG**

Jl. Gatot Subroto, No. 89, Karangrejo Kabupaten Lumajang, 67352 Telp : (0334) 881906

Homepage : <https://www.lumajangkab.bps.go.id>

E-mail : pus2508@bps.go.id

Formulasi Penghitungan Kinerja Program

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026

No	Program	Indikator Program	Formulasi	Target Kinerja TW 1	Penghitungan Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100	0.00%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 0 kegiatan dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten 0 kegiatan dikali 100	0.00%	0.00%
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan dikali 100	0.03%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 62 orang dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 622064 orang dikali 100	0.01%	33.16%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar dikali 100	24.54%	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan sebanyak 911 Orang dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar sebanyak 913 Orang dikali 100	99.78%	406.61%
4	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi jumlah perusahaan dikali 100	10.00%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 672 perusahaan dibagi jumlah perusahaan sebanyak 1100 perusahaan dikali 100	61.09%	610.91%
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan aktif dibagi jumlah keseluruhan tenaga kerja dikali 100	3.00%	Jumlah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan aktif 87688 orang dibagi jumlah keseluruhan tenaga kerja 555154 dikali 100	15.80%	526.51%
5	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian dibagi jumlah masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian dikali 100	0%	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian sebanyak 0 orang dibagi jumlah masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian sebanyak 20 orang dikali 100	0%	0.00%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	22%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi 84 fasilitasi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan 339 fasilitasi dikali 100	24.78%	112.63%



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Veteran Nomor 53 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang Jawa Timur 67311
Telepon (0334) 881546
Pos-el disnaker@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten dikali 100	<p>Ukuran yang menunjukkan sejauh mana seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan rencana tenaga kerja yang telah ditetapkan.</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang merupakan hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja (PTK) Kabupaten/Kota yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja2. perkiraan dan rencana kebutuhan akan tenaga kerja3. neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota. <p>Berdasarkan Kepmenaker Nomor 309 Tahun 2013</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota adalah jumlah kegiatan yang ditetapkan pada RTKD</p> <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan mengacu pada RTKD adalah jumlah realisasi kegiatan RTKD pada tahun N</p>

Perhitungan realisasi

$$\diamond \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{100} \times$$

Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten

$$= \frac{0 \text{ kegiatan}}{0 \text{ kegiatan}} \times 100$$

$$= 0.00\%$$

❖ **Capaian** = Realisasi / Target x 100%


$$= 0\%/0\% \times 100\%$$

$$= \mathbf{0.00\%}$$

- ❖ Realisasi kinerja baru dapat dihitung pada akhir tahun berkenaan.
- ❖ Adanya perubahan rencana penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditindaklanjuti dengan penambahan anggaran/pergeseran anggaran pada perubahan APBD Tahun 2026.
- ❖ Hal-hal yang dilakukan pada periode ini adalah mempersiapkan data-data pendukung yang akan dimasukkan dalam penyusunan dokumen RTKD dan memperbanyak ilmu dengan referensi RTKD yang telah disusun oleh Kab/Kota lain maupun Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.

Lumajang, 10 April 2026

KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN TRANSMIGRASI


ENNY KURNIAWATI, S.Kep.Ners., MMR5
NIP. 19750822 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Veteran Nomor 53 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang Jawa Timur 67311
Telepon (0334) 881546
Pos-el disnaker@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	0%	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar dikali 100	Tenaga kerja yang ditempatkan didalam dan diluar negeri adalah penempatan AKAD, AKL, AKAN, penempatan disabilitas dan penempatan BKK. AKL = Penempatan tenaga kerja dalam provinsi yang difasilitasi oleh pelaksana penempatan tenaga kerja maupun langsung pada pemberi kerja (data PKWT). AKAD = Penempatan tenaga kerja antar Provinsi. AKAN = Penempatan tenaga kerja antar negara (PMI). Jumlah Pencaker terdaftar adalah Pencaker terdaftar di AK1 ditambah penempatan yang tidak terdaftar di AK1

Perhitungan realisasi

$$\begin{aligned} \diamond \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \\ &= \frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan baik dalam maupun luar negeri}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar AK 1 + AKAD/AKL + PKWT}} \times 100 \\ &= \frac{26+72+47+766 \text{ orang}}{26+74+47+766 \text{ orang}} \times 100 \\ &= \frac{911 \text{ orang}}{913 \text{ orang}} \times 100 \\ &= 99.78\% \end{aligned}$$

❖ **Capaian** = Realisasi / Target x 100%


= 99.78%/24.54% X 100%

= **406.61%**

❖ Data Dukung berupa Rekapitulasi Data Kartu Pencari Kerja (AK-1) Tribulan I Tahun 2026, Rekom ID CPMI bulan Januari sd Maret 2026 dan Data Pencari Kerja ditempatkan melalui AKAD/AKL.

Lumajang, 10 April 2026

KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN TRANSMIGRASI


ENNY KURNIAWATI, S.Kep.Ners., MMRS
NIP. 19750822 199803 1 003

b. Data Pencaker ditempatkan melalui Layanan Antar Kerja Lokal dan Serapan Tenaga Kerja

NO	BULAN	RINCIAN	JUMLAH	KET
1	Januari		215 Orang	
		Pt Indomarco Prismatama Tbk	9 Orang	
		Pt. Micro Madani Institute	2 Orang	
		Pt. Aida Duta Indonesia Sejahtera	1 Orang	
		Pt Hendrarta Argaraya	1 Orang	
		Pt Ahwa International Resource	1 Orang	
		Pt Alkurnia Sentosa International	1 Orang	
		Pt Ksmt	23 Orang	
		Pt. Mbs	33 Orang	
		Cv Mks	5 Orang	
		Cv Mjm	1 Orang	
		Pt. Mbj	138 Orang	
2	Februari		407 Orang	
		PT. Micro Madani Institute	1 Orang	
		Lab Persada	8 Orang	
		PT Indomarco Prismatama Tbk	20 Orang	
		PT Prima Karya Sarana Sejahtera	6 Orang	
		PT. Widya Sapta Contractor (WASCO)	1 Orang	
		PT Nangkai	371 Orang	
3	Maret		191 Orang	
		PT BKN	191 Orang	
TOTAL TRIBULAN 1			813 Orang	

c. Data Pencaker ditempatkan yang mendapatkan layanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

No	Bulan	Jumlah Pencaker yang mendapatkan AKAN	Ket
1	Januari	18 orang	-
2	Pebruari	31 orang	-
3	Maret	23 orang	-
	Total	72 Orang	

d. Data Pencari Kerja Terdaftar (AK-1)

No	Bulan	Jumlah Pencaker yang mendapatkan layanan AK-1	Ket
1	Januari	20 orang	-
2	Pebruari	25 orang	-
3	Maret	29 orang	-
	Total	74Orang	

**REKAPITULASI DATA KARTU PENCARI KERJA (AK-1)
 TRIBULAN I TAHUN 2026
 BULAN JANUARI S/D MARET 2026**

NO	BULAN	PENCAKER			PENDIDIKAN		STATUS PERKAWINAN		KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI	0	2	2	SD	2	KAWIN	9	
		0	7	7	SNP	7	BELUM KAWIN	9	
		2	1	3	SMA	3	JANDA	2	
		4	3	7	SMK	7	DUDA	0	
		0	0	0	DIII	0			
		0	1	1	S-1	1			
		0	0	0	S-2	0			
	JUMLAH	6	14	20		20		20	

NO	BULAN	PENCAKER			PENDIDIKAN		STATUS PERKAWINAN		KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	FEBRUARI	1	3	4	SD	4	KAWIN	13	
		2	6	8	SNP	8	BELUM KAWIN	9	
		0	3	3	SMA	3	JANDA	3	
		1	4	5	SMK	5	DUDA	0	
		0	0	0	DIII	0			
		1	0	1	S-1	1			
		0	0	0	S-2	0			
	JUMLAH	5	20	25		25		25	

NO	BULAN	PENCAKER			PENDIDIKAN		STATUS PERKAWINAN		KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MARET	1	6	7	SD	7	KAWIN	14	
		0	4	4	SNP	4	BELUM KAWIN	13	
		5	3	8	SMA	8	JANDA	2	
		5	3	8	SMK	8	DUDA	0	
		0	0	0	DIII	0			
		1	1	2	S-1	2			
		0	0	0	S-2	0			
	JUMLAH	12	17	29		29		29	

**REKAPITULASI DATA KARTU PENCARI KERJA (AK-1)
 TRIBULAN I TAHUN 2026**

NO	BULAN	PENCAKER			PENDIDIKAN		STATUS PERKAWINAN		KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	NAMA	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANUARI s/d MARET	2	13	15	SD	15	KAWIN	38	
		2	17	19	SNP	19	BELUM KAWIN	31	
		7	9	16	SMA	16	JANDA	7	
		10	10	20	SMK	20	DUDA	0	
		0	0	0	DIII	0			
		2	2	4	S-1	4			
		0	0	0	S-2	0			
	JUMLAH	23	51	74		74		74	

Lumajang, 31 Maret 2026
 KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN
 KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI


 Emry Kurniasari S. Kapt. Snes., MMRS
 NIP.19750822 199803 2 003

REKAP JANUARI

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	LUMAJANG			
2	SUMBERSUKO			
3	TEMPEH			
4	PASIRIAN		1	1
5	CANDIPURO	1	1	2
6	PRONOJIWO		2	2
7	TEMPURSARI	3	5	8
8	TEKUNG		1	1
9	YOSOWILANGUN			
10	JATIROTO			
11	KUNIR			
12	SUKODONO	1	1	2
13	KEDUNGAJANG			
14	KLAKAH			
15	RANLYOSO			
16	RANDUAGUNG			
17	PADANG			
18	SENDURO			
19	PASRUJAMBE		1	1
20	GUCIALIT		1	1
21	ROWOKANGKUNG			
TOTAL		5	13	18

NO	NEGARA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Hong Kong	0	6	6
2	Taiwan	4	7	11
3	Turki	1	0	1
TOTAL		5	13	18

NO	JENIS LAYANAN	TOTAL
1	REKOM ID	18
2	GANTI PP	0
TOTAL		18

NO	JABATAN	HONG KONG		TAIWAN		TURKI		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CAREGIVER				6			6
2	DOMESTIC HELPER				1			1
3	DOMESTIC WORKER		2					2
4	HOUSE MAID		4					4
5	HOUSEKEEPING ATTENDANT					1		1
6	WORKER			4				4
Total			6	4	7	1		18

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	LUMAJANG		1	1
2	SUMBERSUKO		1	1
3	TEMPEH		2	2
4	PASIRIAN		5	5
5	CANDIPURO		4	4
6	PRONOJIWO		5	5
7	TEMPURSARI	2	4	6
8	TEKUNG			0
9	YOSOWILANGUN			0
10	JATIROTO		3	3
11	KUNIR	1	1	2
12	SUKODONO			0
13	KEDUNGJAJANG	1		1
14	KLAKAH			0
15	RANUYOSO			0
16	RANDUAGUNG		1	1
17	PADANG			0
18	SENDURO			0
19	PASRUJAMBE			0
20	GUCIALIT			0
21	ROWOKANGKUNG			0
	TOTAL	4	27	31

NO	NEGARA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Hong Kong		12	12
2	Malaysia	2	1	3
3	Singapura		3	3
4	Taiwan	2	11	13
	TOTAL	4	27	31

NO	JENIS LAYANAN	TOTAL
1	REKOM ID	31
2	GANTI PP	0
	TOTAL	31

NO	JABATAN	HONG KONG		MALAYSIA		SINGAPURA		TAIWAN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1	CAREGIVER								9	9
2	DOMESTIC WORKER					3				3
3	ELDERLY CARETAKER		1							1
4	HOUSE MAID		11							11
5	HOUSEKEEPER & FAMILY COOK				1					1
6	PLANTATION WORKER			2						2
7	WORKER							2	2	4
	Total		12	2	1	3	2	2	11	31

REKAP MARET

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	LUMAJANG	0	1	1
2	SUMBERSUKO	0	0	0
3	TEMPEH	0	1	1
4	PASIRIAN	0	2	2
5	CANDIPURO	0	1	1
6	PRONOJIWO	0	3	3
7	TEMPURSARI	4	6	10
8	TEKUNG	0	0	0
9	YOSOWILANGUN	0	0	0
10	JATIROTO	0	2	2
11	KUNIR	0	2	2
12	SUKODONO	0	1	1
13	KEDUNGAJANG	0	0	0
14	KLAKAH	0	0	0
15	RANUYOSO	0	0	0
16	RANDUAGUNG	0	0	0
17	PADANG	0	0	0
18	SENDURO	0	0	0
19	PASRUJAMBE	0	0	0
20	GUCIALIT	0	0	0
21	ROWOKANGKUNG	0	0	0
TOTAL		4	19	23

NO	NEGARA	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Hong Kong	0	6	6
2	Malaysia	0	3	3
3	Singapura	0	4	4
4	Taiwan	4	6	10
TOTAL		4	19	23

NO	JENIS LAYANAN	TOTAL
1	REKOM ID	
2	GANTI PP	
TOTAL		

NO	JABATAN	HONG KONG		MALAYSIA		SINGAPURA		TAIWAN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13
1	BABY SITTER			0	2					
2	DOMESTIC WORKER					0	4			
3	ELDERLY CARETAKER									
4	HOUSE MAID	0	6							
5	HOUSEKEEPER & FAMILY COOK			0	1					
6	CAREGIVER							0	5	
7	WORKER							4	1	
Total		0	6	0	3	0	4	4	6	23



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Veteran Nomor 53 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang Jawa Timur 67311
Telepon (0334) 881546
Pos-el disnaker@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Meningkatnya Fasilitas Ketransmigrasian	Persentase Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Ketransmigrasian	0%	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian dibagi Jumlah Masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian dikali 100	Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian adalah masyarakat yang mendapatkan informasi tentang regulasi kebijakan pemerintah tentang ketransmigrasian Masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian adalah masyarakat yang telah melakukan pendaftaran dan ditentukan oleh dinas tenaga kerja

Perhitungan realisasi

$$\begin{aligned} \text{❖ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Ketransmigrasian}}{\text{Jumlah Masyarakat yang membutuhkan informasi ketransmigrasian}} \times 100 \\ &= \frac{0 \text{ orang}}{0 \text{ orang}} \times 100 \\ &= 0.00\% \end{aligned}$$

$$\text{❖ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

$$= 0\%/0\% \times 100\%$$

$$= 0.00\%$$

- ❖ Rencana aksi untuk indikator program pembangunan kawasan transmigrasi pada triwulan III tahun 2026.
- ❖ Kendala yang dihadapi untuk kinerja ini adalah adanya perubahan regulasi di bidang ketransmigrasian yang masih dalam proses penyesuaian. Hal ini merupakan tindak lanjut adanya nomenklatur Kementerian baru yaitu Kementerian Transmigrasi yang berdiri sendiri.

- ❖ Hal-hal yang dilakukan pada periode ini adalah aktif berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur maupun Kementerian Transmigrasi untuk update regulasi terbaru.

Lumajang, 10 April 2026

KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
DAN TRANSMIGRASI



ENNY KURNIAWATI, S.Kep.Ners., MMRS
NIP. 19750822 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Veteran Nomor 53 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang
Kabupaten Lumajang Jawa Timur 67311
Telepon (0334) 881546
Pos-el disnaker@lumajangkab.go.id

BUKTI DUKUNG MONEV KINERJA TRIBULAN I TAHUN 2026

Sasaran	Indikator	Target	Formulasi	Definisi Operasional
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	22%	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dilaksanakan dalam Tahun N Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan adalah seluruh fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dalam Tahun N

Perhitungan realisasi

$$\diamond \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi}}{\text{Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan}} \times 100$$

$$= \frac{84 \text{ fasilitasi}}{339 \text{ fasilitasi}} \times 100$$

$$= 24.78\%$$

$$\diamond \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

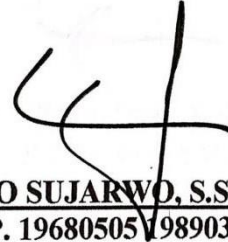
$$= 24.78\% / 22\% \times 100\%$$

$$= 112.63\%$$

- ❖ Bukti dukung berupa Rekapitulasi Penghitungan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Triwulan I Tahun 2026 (Terlampir)

Lumajang, 10 April 2026

Sekretaris



CIPTO SUJARWO, S.Sos., S.Pd
NIP. 19680505198903 1 012

**Penghitungan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
PADA SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG T.A. 2026
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan

Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi

NO	URAIAN	Terencanakan	NO	URAIAN	Terfasilitasi
I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
A	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		A	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renja	1		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Renja	
	2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen P-Renja	1		2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen P-Renja	
B	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		B	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA	1		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA	
C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		C	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1		1. Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	
D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		D	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan LAKIP	1		1. Fasilitasi Penyusunan LAKIP	1
	2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen LKJ Pejabat	3		2. Fasilitasi Penyusunan Dokumen LKJ Pejabat	
	3. Fasilitasi Penyusunan LPPD	1		3. Fasilitasi Penyusunan LPPD	1
E	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		E	Fasilitasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan E-81	4		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan E-81	1
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan SKM	4		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan SKM	1
F	Fasilitasi Penyusunan Walidata pendukung statistik sektoral daerah		F	Fasilitasi Penyusunan Walidata pendukung statistik sektoral daerah	
	1. Fasilitasi penyusunan dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1		1. Fasilitasi penyusunan dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
G	Fasilitasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		G	Fasilitasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	1. Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	12		1. Fasilitasi Gaji dan Tunjangan ASN	3
	2. Fasilitasi Tambahan Penghasilan ASN	12		2. Fasilitasi Tambahan Penghasilan ASN	3
H	Fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		H	Fasilitasi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
	1. Fasilitasi Honorarium Pengelola Keuangan	12		1. Fasilitasi Honorarium Pengelola Keuangan	3
	2. Fasilitasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12		2. Fasilitasi Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3
I	Fasilitasi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		I	Fasilitasi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	1. Fasilitasi penyusunan dokumen akuntansi SKPD	12		1. Fasilitasi penyusunan dokumen akuntansi SKPD	3
J	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		J	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1
K	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		K	Fasilitasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12		1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
L	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		L	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2		1. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
M	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		M	Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	1. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		1. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3
Administrasi Umum Perangkat Daerah					
N	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		N	Fasilitasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	1. Fasilitasi Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	1		1. Fasilitasi Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	1
O	Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor		O	Fasilitasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	1. Fasilitasi Bahan Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	1		1. Fasilitasi Bahan Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	1
	2. Fasilitasi Pengadaan Alat Tulis Kantor	1		2. Fasilitasi Pengadaan Alat Tulis Kantor	
	3. Fasilitasi Pengadaan Kertas	1		3. Fasilitasi Pengadaan Kertas	1
P	Fasilitasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		P	Fasilitasi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	1. Fasilitasi Pengadaan Cetak Rutin Kantor	1		1. Fasilitasi Pengadaan Cetak Rutin Kantor	1
	2. Fasilitasi Penyediaan Penggandaan Rutin Kantor	1		2. Fasilitasi Penyediaan Penggandaan Rutin Kantor	
Q	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Q	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	1. Fasilitasi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	12		1. Fasilitasi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	3
	2. Fasilitasi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	12		2. Fasilitasi Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	3
	3. Fasilitasi peyediaan konsumsi rapat koordinasi	12		3. Fasilitasi peyediaan konsumsi rapat koordinasi	

NO	URAIAN	NO	URAIAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
R	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	R	Fasilitasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	1. Fasilitasi Jasa Rekening Telepon		1. Fasilitasi Jasa Rekening Telepon
	2. Fasilitasi Jasa Rekening Listrik		2. Fasilitasi Jasa Rekening Listrik
	3. Fasilitasi Jasa Rekening Air		3. Fasilitasi Jasa Rekening Air
S	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	S	Fasilitasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	1. Fasilitasi Jasa Tenaga Administrasi		1. Fasilitasi Jasa Tenaga Administrasi
	2. Fasilitasi Jasa Tenaga Kebersihan outsourcing		2. Fasilitasi Jasa Tenaga Kebersihan outsourcing
	3. Fasilitasi Jasa Tenaga Supir outsourcing		3. Fasilitasi Jasa Tenaga Supir outsourcing
	4. Fasilitasi Jasa Pengolahan Sampah		4. Fasilitasi Jasa Pengolahan Sampah
	5. Fasilitasi Jasa Premi Asuransi Kesehatan		5. Fasilitasi Jasa Premi Asuransi Kesehatan
	5. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		5. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
	7. Fasilitasi Jasa Jaminan Kematian		7. Fasilitasi Jasa Jaminan Kematian
	8. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan hari tua		8. Fasilitasi Jasa Premi Jaminan hari tua
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
T	Fasilitasi Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	T	Fasilitasi Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1. Fasilitasi BBM Kendaraan Operasional Kantor Roda 4		1. Fasilitasi BBM Kendaraan Operasional Kantor Roda 4
	2. Fasilitasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 4		2. Fasilitasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 4
	3. Fasilitasi Servis Kendaraan Dinas Roda 4		3. Fasilitasi Servis Kendaraan Dinas Roda 4
	4. Fasilitasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 2		4. Fasilitasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 2
U	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	U	Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1. Fasilitasi Pemeliharaan Personal Komputer		1. Fasilitasi Pemeliharaan Personal Komputer
	2. Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer		2. Fasilitasi Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer
	3. Fasilitasi Pemeliharaan AC		3. Fasilitasi Pemeliharaan AC
	JUMLAH		JUMLAH
	339		84

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran :

Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi

$$= \frac{\text{Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan}}{\text{Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan}} \times 100 \%$$

Jumlah pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan

$$= \frac{84}{339} \times 100 \%$$

$$= 24.78\%$$